

Polda Jabar Cari Erwan Sa'ad Usai Mendeklarasi Tentara Allah

BANDUNG (IM) - Polda Jabar melakukan penyelidikan terkait video deklarasi Laskar Jundullah atau Tentara Allah yang terjadi di Perkampungan Sasak Bubuk, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Saat ini polisi sedang mencari keberadaan Ustadz Erwan Saad (ES) yang tiba-tiba menghilang usai mendeklarasikan Tentara Allah, yang sempat viral di media sosial (mendsos).

Informasi yang didapat kepolisian, ternyata masyarakat Sasak Bubuk tidak mengerti dan mengetahui apa yang disampaikan oleh ES, sehingga mereka mengikuti apa yang dikatakan ES saat deklarasi Tentara Allah.

Banyak warga sudah mengatakan bahwa mereka tidak lagi ikut-ikutan lagi dalam Laskar Jundullah karena tidak sejalan dengan masyarakat sekitar.

"Kami tadi sudah berkumpul dengan unsur muspika dan warga. Hasilnya dibuat surat pernyataan bersama oleh warga yang ditandatangani di atas materai," kata Kepala Desa Mekarmukti Andriawan Burhanudin di lokasi, Selasa (5/1) kemarin.

Surat pernyataan bersama itu ditandatangani oleh sebanyak 14 warga yang hadir pada saat deklarasi. Isi dari pernyataan tersebut adalah, bahwa warga Kampung Cicalengka/Sasak Bubuk RT 04/03, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, KBB, membatalkan deklarasi Jundullah.

Selain membatalkan, warga juga menolak deklarasi Jundullah yang dipimpin Ustadz Erwan Sa'ad di Masjid Jami Lembur Sawah, pada Jumat 1 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.

Dipimpin oleh ustadz Ali, jamaah di masjid tersebut mengatakan, jika penolakan dan pembatalan deklarasi dilakukan bukan atas paksaan atau intervensi pihak manapun.

Kepolisian sendiri saat ini tengah mencari keberadaan ES untuk dimintai keterangan karena setelah video deklarasi Laskar Jundullah viral, yang bersangkutan menghilang. • **lus**

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



RILIS KASUS SURAT SWAB PCR PALSU

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (tengah) menghadirkan tersangka saat rilis kasus pemalsuan surat swab PCR Covid-19 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (7/1). Subdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus manipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat keterangan swab PCR Covid-19 dengan mengamankan tiga orang tersangka dan sejumlah barang bukti.

Mahfud MD: Nama-nama Calon Kapolri yang Beredar di Masyarakat Masih Spekulasi

Komjen Gatot Eddy disebut salah satu sebagai calon kapolri yang muncul di lingkungan istana. Namun, Mahfud memastikan bahwa nama-nama calon Kapolri yang beredar di masyarakat masih spekulasi.

JAKARTA (IM) - Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) memastikan, nama-nama calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Idham Azis yang beredar di masyarakat masih sebatas spekulasi atau lempar bola.

"Sebagai Ketua Kopolnas, saya pastikan bahwa semua nama yang beredar itu masih spekulasi, lempar-lempar bola," kata Mahfud MD saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (7/1).

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, rekomendasi final soal siapa saja sosok yang dianggap memumpuni mengisi

kursi Kapolri, akan diserahkan secara langsung Kopolnas ke Presiden Jokowi.

"Semua nama yang beredar adalah spekulasi. Akhirnya diputuskan oleh Kopolnas, untuk diserahkan kepada Presiden, kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR," ujar Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan, kemungkinan untuk proses pengajuan nama calon Kapolri dari Presiden Jokowi ke DPR akan dilakukan pada 11 Januari 2021 mendatang.

"Dari Presiden ke DPR mungkin tanggal 11 Januari

2021 sudah diserahkan. Tapi dari Kopolnas atau ke Kopolnas kan kapan-kapan, bisa besok, bisa tanggal 10, bisa tanggal 11 Januari pagi," ucap Mahfud.

Sekadar diketahui, isu pergantian Kapolri terus menghangat sampai saat ini. Banyak informasi-informasi yang mengklaim bahwa Presiden telah mengantongi satu nama.

Pada faktanya, sampai saat ini pihak Istana belum mengonfirmasi hal tersebut. Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada medio akhir Januari 2021.

Bocoran dari Lingkaran Istana Sementara itu, Indonesian Police Watch (IPW) mengaku sudah mengantongi informasi dua nama calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang mengemuka di lingkungan istana kepresidenan.

IPW mempercayakan sosok calon Kapolri yang santer terdengar sedang diperbin-

cangan di lingkungan istana tersebut.

"Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkrystal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Kamis (7/1).

Menurut Neta, pihak internal Polri berharap Joo Widodo (Jokowi) dapat memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Begitu juga untuk posisi Wakapolri, diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior.

"Dengan demikian, pada periode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023," beber Neta.

"Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," imbuhnya.

Neta menyebut salah satu nama calon kapolri yang muncul di lingkungan istana yakni, Komjen Gatot Eddy.

Kata Neta, pihak istana sedang membuat gagasan paketan kapolri dan wakapolri dengan menyandingkan Gatot Eddy dan Listyo Sigit Prabowo.

"Dari pantauan IPW gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR, setelah Wanjakti Polri dan Kopolnas menyampaikan usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden," tandasnya. • **lus**

IDN/ANTARA



KASUS PEREDARAN NARKOBA

Polisi menunjukkan barang bukti saat untkap kasus peredaran narkoba di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/1). Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil menangkap tersangka SR (29) atas kasus dugaan mengedarkan narkoba dan mengamankan barang bukti sabu seberat 7,24 kilogram serta tabung kompresor.

Polisi Rapat Teknis Pengamanan di Wilayah Perbatasan yang Batasi Kegiatan Masyarakat

JAKARTA (IM) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar rapat dengan Satgas Covid-19 terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, demi mengendalikan penyebaran pandemi virus korona (Covid-19).

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Rudy Antriksawa menyebut, at ini pihaknya sedang membahas teknis pengamanan di wilayah perbatasan terkait kebijakan itu. Namun, ia belum bisa memastikan apakah akan ada penekatan atau cara bertindak lainnya.

"Kami baru rapat pembahasan SE tentang perjalanan ini, tunggu aja. Baru berlangsung, dengan gugus tugas (Satgas Covid-19) dan lain-lain," kata Rudy saat dihubungi, Jakarta, Kamis (7/1).

Di sisi lain, Rudy memperkirakan bahwa aturan tersebut nantinya akan rampung dan mulai diberlakukan pada 11 Januari mendatang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini dilakukan karena kasus yang terinfeksi virus covid-19 terus bertambah setiap minggunya. Pada bulan Januari kami demi mengendalikan penyebaran pandemi virus korona mencapai 51.986 kasus.

"Kasus itu kita monitoring per minggunya meningkat bukan menurun. Jadi per Desember kasus perminggunya mencapai 48.434. Dan pada bulan Januari 51.986 kasus" katanya di Jakarta, Kamis (7/1).

Selain itu, lanjut Airlangga, rumah sakit di beberapa daerah di pulau jawa kapasitas ketersediaan isolasi dan ICU yang menampung pasien covid sudah lebih dari 70%.

Kondisi itu sebagian terjadi Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

"Kita juga memonitoring liburan Natal dan Tahun Baru, dampaknya 2 minggu. Jadi dampaknya baru terlihat di pertengahan Januari, sehingga dengan mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah melakukan pembatasan baru ini," jelasnya. • **lus**

Jenderal Idham Azis Terima Wing Kehormatan Penerbang dan Brevet Kapal Selam Hiu Kencana

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerima penghargaan berupa Wing Kehormatan Penerbang Kelas I TNI Angkatan Udara dan Brevet Kapal Selam Hiu Kencana TNI Angkatan Laut.

Penghargaan ini diberikan langsung Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marskal TNI Fadjar Prasetyo dengan disaksikan secara

langsung oleh Panglima TNI Marskal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1).

"Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk sinergitas yang mengkrystal antara TNI-Polri dalam berkarya untuk membangun bangsa dan negara," kata Kadiv Humas Polri Irfan Argo Yuwono dalam keterangannya.

Menurut Argo, pemberian anugerah ini merupakan ben-

tuk penghormatan dan penghargaan kepada Kapolri atas jasa-jasanya yang dianggap luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan di lingkungan TNI.

"Penghargaan yang diberikan ini kepada Kapolri juga untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi guna meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara," ujar Argo.

Pemberian hak untuk

menerima dan memakai Wing Kehormatan Penerbang Kelas 1 TNI AU berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/269/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Sebagai bentuk penghormatan kepada Kapolri, diakhir acara ditampilkan demonstrasi Fly Pass 4 pesawat F 16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 Madiun dengan pilot Letkol Pnb Agus Dwi Ariyanto, Mayor

Pnb Ferry Rachman, Lettu Pnb Hangga Dwiaryanto dan Lettu Pnb Panji Satria Dewanto.

Turut hadir pada acara tersebut di antaranya Wakasus Marsda TNI Fahrur Zaini Isnanto, Irfan Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi dan Kapuspren TNI Mayjen TNI Achmad Riad. • **lus**

Kapolda NTB Tegaskan Ulama Kunci Utama Penyelesaian Masalah

JAKARTA (IM) - Para tokoh agama terkemuka di Nusa Tenggara Barat (NTB) menanggapi pesan pada Kapolda NTB Irfan Mohammad Iqbal, terkait persaudaraan antarsama umat muslim maupun non-muslim.

Pesan persaudaraan dari tokoh agama itu disampaikan kepada Iqbal ketika menggelar doa bersama dan acara silaturahmi 'Ummat Bersatu, NTB Damai' digelar di Lapangan Tennis Mapolda NTB untuk mengawali Tahun 2021.

Dalam Doa bersama itu, dihadiri juga Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI A Rizal Ramdhani, Gubernur NTB Zulkief-limansyah, Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda dan sejumlah tokoh agama serta pemuda di 'Bumi

Scribu Masjid'.

"Kami tidak bisa bekerja dengan maksimal apabila tidak dibantu oleh semua stakeholders dan semua elemen, sekaligus yang paling penting terutama adalah doa dan peran para ulama, para tuhan guru," ujar Irfan Mohammad Iqbal melalui keterangan resminya, Kamis (7/1).

Iqbal mengutarakan bahwa, ulama dan tokoh masyarakat merupakan kunci utama dalam setiap penyelesaian masalah. Tak dipungkiri, lanjutnya, aparat TNI-Polri memerlukan bantuan peran para tokoh dalam melaksanakan tugas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Saya dinaschati oleh Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad

Turmuzdi Badruddin, katanya, 'Pak Kapolda, insyaAllah kalau niatnya baik, insyaAllah, Allah akan mengatur dan menyusun apa yang menjadi atau diniatkan,'" imbuhnya.

Mantan Kadiv Humas Polri itu berharap silaturahmi dan doa bersama dapat menjadi momen seluruh peserta meneguhkan komitmen menjaga kedamaian di NTB. Iqbal tak memungkirinya pasti ada dinamika dalam hidup bermasyarakat, namun, bila seluruh elemen bergandengan tangan maka permasalahan dapat teratasi dengan solusi.

"Semoga dengan kita duduk bersama, bersilaturahmi dan berdoa, semua permasalahan akan segera mendapatkan titik temu dan solusi. Amin," harapnya.

Pada kesempatan yang sama,

tokoh agama dari ormas Nahdlatul Ulama (NU) NTB TGH Ma'rif Makmun Diranse menyinggung masalah pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL). Dia meminta semua pihak menempatkan kedamaian sebagai prioritas.

"Persoalan bandara jangan diributkan, jangan sampai membenturkan pemuka-pemuka atau pimpinan NU dan NW. Karena mereka (warga NW) adalah sahabat atau teman. Di antara kami ada hubungan emosional, ada hubungan silsilah keagamaan, dan lain-lain. Karenanya, kami warga Nahdlatul Ulama meminta agar permasalahan nama bandara, jangan dikait-kaitkan dengan NU dan NW. Mari kita serahkan kepada pemerintah dan yg berwenang,"

ujar Pimpinan Ponpes Manhulul Ma'arif Darek itu.

Sedangkan perwakilan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) TGH Yusuf Makmun mengatakan, hidup pasti beriringan dengan masalah, termasuk soal pergantian nama bandara. Namun, permasalahan tidak semestinya membuat antarmasyarakat bermusuhan dan menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan.

"Perbedaan jangan menjadikan suatu masalah, karena sudah sewajarnya dalam hidup pasti ada masalah.

Mari jadikan perbedaan menjadi sebuah kebersamaan. Soal nama bandara, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah," tuturnya. • **lus**

LANJUTAN SIDANG PRAPERADILAN

Polisi Enggan Komentari Keterangan Saksi dan Ahli dari Pihak Habib Rizieq

JAKARTA (IM) - Polisi enggan mengomentari tentang keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan FPI dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Habis Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Itu kan saksi yang dihadirkan Pemohon, dia menyampaikan apa yang dia ketahui saja, itu saja," ujar Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki pada wartawan, Kamis (7/1).

Menurutnya, Pemohon tak mempersoalkan keterangan yang diberikan saksi di dalam sidang praperadilan keempat ini.

Pasalnya, saksi dan ahli hanya menjelaskan tentang apa yang diketahuinya saja dalam kasus tersebut.

"Kalau dari kami kan belum, itu besok rencananya, yang mana sudah kami siapkan, sesuai kebutuhan saja (jumlahnya saksi dan ahlinya)," katanya.

Sebelumnya, Pengacara

Habib Rizieq, Alamsyah Hanafiah mengatakan, pihaknya kali ini bakal menghadirkan 2 saksi fakta dan 2 ahli di persidangan praperadilan keempat ini.

Adapun dua saksi fakta yang dihadirkan itu merupakan warga setempat yang datang ke acara Maulid Nabi tanpa diundang.

"Ahlinya rencananya itu zoom kalau bisa di zoom Prof. Sutegi, lalu Fernando yang bisa hadir informasinya.

Mereka ahli hukum pidana dan ahli hukum acara pidana," ujarnya.

Selain dua ahli itu, kata dia, pihaknya juga berencana menghadirkan ahli Maulid Nabi, yang mana rencana ahlinya itu Rhoma Irama lantaran dia juga sebagai seorang penceramah. Sejuah ini, dia juga sudah menghubungi Rhoma Irama agar bisa dijadikan ahli tersebut.

"Kan beliau (Rhoma Irama) biasa berdakwah Maulid Nabi juga gitu loh tuturnya. • **lus**

IDN/ANTARA



SINERGI TNI DAN POLRI MENJAGA NKRI

Anggota TNI dan Polri mengikuti latihan menembak bersama di Mako Brimob Subden 3/C Pelopok, Gunung Kendil, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (7/1). Latihan bersama TNI dan Polri tersebut diikuti anggota Polda Jawa Tengah dan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro yang berada di wilayah Surakarta untuk meningkatkan kemampuan personel TNI-Polri dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lowongan Kerja 职位空缺

MARKETING FREELANCE

Syarat :

- Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
- Penampilan Menarik dan Rapi
- Orientasi Target dan Komisi
- Minimal Lulusan SMA / Sederajat
- Berpengalaman di bidang Marketing
- Domisili Medan - Sumatera Utara

Lamaran dikirim Via Email :
w.pandjaitan1@gmail.com